

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai, gambaran umum perpustakaan Desa Kepuh, hasil penelitian, dan temuan yang berhubungan dengan rumusan masalah dengan judul penelitian yaitu Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Perpustakaan Desa (Studi Kasus di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung), berikut paparannya:

A. Paparan Data

1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung yang difokuskan di perpustakaan Desa Kepuh. Desa Kepuh adalah satu desa di Kecamatan Boyolangu yang beralamatkan di Jalan Sukun kode pos 66234. Lokasi desa Kepuh cukup strategis, memiliki akses jalan yang mudah dan merupakan wilayah dataran rendah. Jarak dari pusat Ibu Kota Kecamatan hanya 3 km dan pusat Ibu Kota Kabupaten berjarak 3 km. Batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Serut, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wajak Lor, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Beji, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karangrejo. Desa Kepuh dengan luas wilayah 162,755 Ha memiliki tiga dusun yaitu Dusun Tugu, Kedung Bendo, dan Putuk. Desa ini adalah salah satu sentra industri rumahan jajanan gipang.

2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Data penduduk Desa Kepuh Tahun 2020 sejumlah 4676 jiwa dengan prosentase 2224 laki-laki dan 2452 perempuan. Berikut perincian penduduk Desa Kepuh:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-laki	2224 Orang
2.	Perempuan	2452 Orang
Total		4676 Orang

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Kepuh Tahun 2020¹

Data jumlah penduduk ini berguna untuk mengevaluasi apakah Perpustakaan Desa sudah mampu mengakomodir sejumlah 4676 orang penduduk Desa Kepuh. Data ini juga digunakan untuk mengetahui jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan serta jumlah penduduk yang seharusnya dilayani.

3. Keadaan penduduk Menurut Mata Pencaharian

Berdasarkan sector mata pencaharian mayoritas penduduk desa berprofesi sebagai petani sejumlah 447 orang, perkebunan 98 orang, peternakan 34 orang, perikanan 25 orang, perdagangan 167 orang, wiraswasta / sector jasa 173 orang, dan mata pencaharian lainnya sejumlah 327 orang²

4. Keadaan Penduduk Menurut Kepercayaan (Agama)

Agama mayoritas yang dianut di Desa Kepuh adalah agama Islam disusul oleh agama Kristen. Berikut perinciannya:

No.	Pemeluk Agama	Jumlah
1.	Islam	4664 Orang
2.	Kristen	12 Orang
Total		4676 Orang

¹Data Kependudukan (Siak Desa) Desa Kepuh

²Hasil Dokumentasi Profil Desa Pemerintah Desa Kepuh

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Kepuh Menurut Kepercayaan (Agama)³

5. Visi, Misi dan Tujuan Perpustakaan Desa

a. Visi

Terwujudnya perpustakaan sebagai sumber informasi dan pengetahuan masyarakat

b. Misi

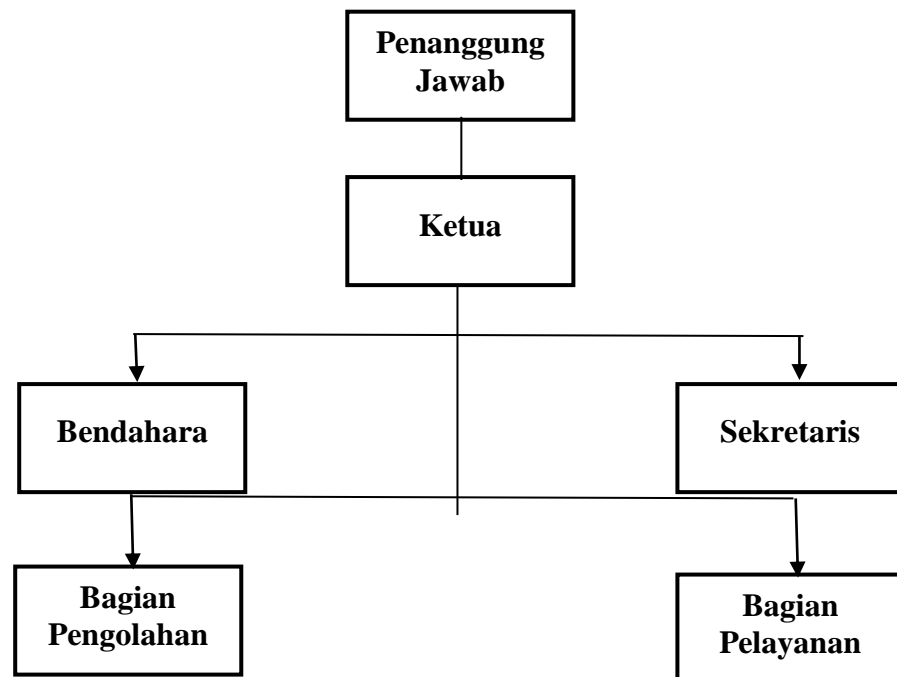
1. Menyediakan bahan informasi cetak ataupun non cetak
2. Menyediakan ruang perpustakaan yang nyaman dan aman
3. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat
4. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat

c. Tujuan

1. Mewujudkan penyediaan bahan informasi cetak ataupun non cetak
2. Mewujudkan ruang perpustakaan yang nyaman dan aman
3. Mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat
4. Mewujudkan minat dan budaya baca masyarakat

³Hasil Dokumentasi Profil Desa Pemerintah Desa Kepuh

6. Struktur Organisasi Perpustakaan Desa



Bagan 4.1 Hasil dokumentasi observasi perpustakaan cerdas desa Kepuh.

7. Pelayanan

Pelayanan yang digunakan di perpustakaan Desa Kepuh adalah pelayanan system terbuka yang berarti pengunjung dapat secara bebas mencari buku yang diinginkan di rak buku yang sudah disediakan oleh pihak perpustakaan.

Layanan Perpustakaan Desa:

- a. Layanan Sirkulasi (pinjam-kembali koleksi perpustakaan) dan baca ditempat
- b. Layanan Referensi dan Rujukan
- c. Layanan WiFi Area

8. Tata Tertib Perpustakaan Desa Kepuh:

- a. Pelayanan perpustakaan seminggu 2 kali setiap hari Rabu dan Sabtu.
- b. Pelayanan dibuka mulai pukul 08.00 sampai pukul 12.00 WIB
- c. Pengunjung diharap mengisi buku tamu
- d. Peminjam buku maksimal 2 buku selama 7 hari dan apabila terlambat dikenakan denda Rp. 100,- per buku selama sehari dan sebagai kas perpustakaan serta pengembangan buku.
- e. Buku hilang atau rusak ditanggung peminjam
- f. Masuk awal menjadi anggota dikenakan biaya Rp 1.000,- sebagai biaya administrasi selama 1 tahun.

9. Kegiatan pengelolaan perpustakaan

- a. Pendaftaran dan pencatatan
- b. Pemberian nomor induk dan nomor klasifikasi buku
- c. Pemberian cap perpustakaan
- d. Pemberian katalog dan kartu buku
- e. Penempatan buku di rak
- f. Penyusunan buku menurut klasifikasi buku
- g. Pembuatan peraturan peminjaman dan tata tertib perpustakaan

10. Sarana prasarana dan perlengkapan lain yang digunakan untuk pelayanan perpustakaan antara lain :

No.	Jenis Barang	Jumlah
1.	Rak buku	1
2.	Buku induk	1
3.	Buku tamu	2
4.	Meja kerja	1
5.	Buku anggota	1
6.	Stempel perpustakaan	1
7.	Buku pinjam perpustakaan	1
8.	Jam dinding	1
9.	Tempat sampah plastik	1
10.	Papan pengumuman	1

Tabel 4.3 Hasil Observasi Dokumentasi Perpustakaan Desa Kepuh

11. Koleksi Perpustakaan

000 Karya Umum	600 Ilmu-ilmu Terapan
100 Filsafat	700 Kesenian dan Olahraga
200 Agama	800 Kesusteraan
300 Ilmu-ilmu social	900 Sejarah dan Geografi
400 Bahasa	
500 Ilmu-ilmu Murni	

B. Hasil Wawancara

1. Penerapan Pengelolaan Perpustakaan Desa di Desa Kepuh

Secara substantif pengelolaan perpustakaan desa sebenarnya hampir sama dengan pengelolaan jenis yang lain. Perpustakaan desa mempunyai standar-standar tertentu yang perlu dan harus dipenuhi agar perpustakaan desa/kelurahan dapat berjalan dengan baik. Jika dilihat dari kelompok jenis perpustakaan, perpustakaan desa termasuk perpustakaan umum yang berada di desa. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang dikelola oleh pemerintah dan melayani masyarakat umum. Demikian juga dengan perpustakaan desa, adalah perpustakaan yang dikelola oleh pemerintah desa/kelurahan dan melayani masyarakat umum di tingkat desa/kelurahan. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan perpustakaan desa, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan. Berikut adalah hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari observasi, wawancara dan dokumentasi di Perpustakaan Desa Kepuh.

Setiap perpustakaan memiliki sejarah berdirinya, termasuk juga perpustakaan cerdas Desa Kepuh. Pertanyaan pertama peneliti ajukan kepada kepala perpustakaan Desa Kepuh, pertanyaannya adalah bagaimana latar belakang berdirinya perpustakaan desa? Adapun pernyataan dari kepala perpustakaan yaitu:

Awal mula berdirinya perpustakaan desa itu tahun 2006, karena ada ruangan di balaidesa yang tidak difungsikan atau kosong. Saya mendapat mandat dari kepala desa untuk membuat pojok baca disana mbak dan akhirnya terbentuklah perpustakaan desa. Pada perkembangannya pada tahun 2007 perpustakaan cerdas mendapatkan sumbangan buku dari perpustakaan Tulungagung sebanyak 760 eksemplar buku⁴.

Pernyataan lain juga disampaikan oleh mantan kepala desa, beliau berpendapat bahwa:

⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Konitin Kepala Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 2 Juli 2021

Perpustakaan Cerdas sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan bertujuan untuk mengenalkan budaya membaca kepada masyarakat. Perpustakaan ini terbentuk pada tahun 2006 dengan memanfaatkan lahan kosong di balai desa dengan ukuran 3x5 meter. Pertama kali pembukaan perpustakaan cerdas masih banyak sekali kekurangannya mbak, kemudian kita bekerjasama dengan perpustakaan desa Tulungagung untuk mendapatkan sumbangan buku⁵.

Dalam sebuah organisasi atau lembaga visi dan misi penting keberadaannya untuk menjalankan roda organisasi atau lembaga. Setiap organisasi memiliki visi dan misi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu visi dan misi penting bagi berjalannya organisasi. Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada kepala perpustakaan adalah apakah perpustakaan desa sudah memiliki visi dan misi? Adapun pernyataan dari kepala perpustakaan yaitu:

Kami sudah memiliki visi dan misi sebagai acuan untuk pencapaian tujuan yang ingin kami capai sehingga langkah yang kami ambil akan lebih jelas dan efektif⁶.

Layanan perpustakaan adalah layanan yang diberikan pustakawan kepada pemustaka yang datang ke perpustakaan. Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada kepala perpustakaan adalah bagaimana pelayanan di perpustakaan cerdas Desa Kepuh?

Pelayanan perpustakaan berjalan kurang maksimal. Ini dikarenakan tenaga perpustakaan bukan tenaga khusus, melainkan guru paud yang harus membagi waktu agar perpustakaan tetap berjalan dengan baik. Jam operasional yang bisa kami buka hanya pukul 08.00-12.00 siang saja. Tentu dengan terbatasnya waktu akan berpengaruh terhadap tidak optimalnya pelayanan yang kami berikan⁷.

Jawaban lain dari pengguna perpustakaan mengenai pelayanan perpustakaan desa, yaitu:

⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Slamet Mantan Kepala Desa Kepuh, pada tanggal 5 Juli 2021

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Konitin Kepala Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 2 Juli 2021

⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Konitin Kepala Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 2 Juli 2021

Banyak kurangnya sih mbak, di dalam perpustakaan belum tersedia tempat duduk sehingga kalau mau membaca di tempat harus diluar perpustakaan⁸.

Tempat menjadi factor penting yang berkaitan dengan akses mudah dan tidaknya sebuah tempat dijangkau oleh masyarakat. Dalam hal ini perpustakaan harus jempot bola seperti halnya penempatan lokasi atau tempat perpustakaan, sebaiknya berada pada tempat yang strategis agar masyarakat mudah untuk menjangkaunya. Pemilihan lokasi di rumah perangkat desa, atau membangun perpustakaan di wilayah pusat desa agar kehadirannya diketahui oleh khalayak⁹. Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada kepala perpustakaan adalah bagaimana menurut pendapat ibu mengenai tempat perpustakaan desa yang berada di balai desa Kepuh? Adapun pernyataan dari kepala perpustakaan yaitu:

Tempat perpustakaan sudah pindah sebanyak dua kali. Dulunya ada di sebelah utara dekat kamar mandi itu ada ruangan kosong. Kemudian dipindahkan di selatan. Memang kurang strategis, perlu tempat yang mudah dijangkau masyarakat. Dan bangunan perpustakaan juga perlu diperluas demi kenyamanan pemustaka¹⁰.

Berdasarkan wawancara dengan warga pengguna perpustakaan yang bernama Weni Irawati mengenai tempat perpustakaan, menyatakan bahwa:

Keberadaan perpustakaan yang letaknya di balai desa sebenarnya kurang terlihat dan diketahui oleh masyarakat. Coba letaknya lebih strategis pasti minat baca masyarakat juga lebih meningkat¹¹.

Koleksi merupakan salah satu bagian penting dari perpustakaan yang tidak boleh diabaikan keberadaannya. Berhasil tidaknya

⁸Hasil Wawancara dengan Siti Aminah Pengguna Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 12 Juli 2021

⁹*Mewujudkan Desa Pintar melalui Perpustakaan Desa*, <http://www.batukar.info/komunitas/articles/mewujudkan-desa-pintar-melalui-perpustakaan-desa> diakses pada tanggal 22 Juni 2021 pada pukul 04.07

¹⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Konitin Kepala Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 2 Juli 2021

¹¹Hasil Wawancara dengan Weni Irawati Pengguna Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 11 Juli 2021

perpustakaan dapat dilihat dari kemampuan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan pemustaka. Pengembangan koleksi harus dilakukan secara terprogram agar koleksi perpustakaan terupdate (sesuai perkembangan zaman).

Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada kepala perpustakaan adalah bagaimana menurut pendapat ibu mengenai pengembangan koleksi perpustakaan desa? Adapun pernyataan dari kepala perpustakaan yaitu:

Pada prinsipnya pengadaan koleksi ini merupakan hal krusial dalam pemenuhan kebutuhan koleksi perpustakaan. Sejauh ini koleksi buku kami dapatkan dari hibah atau hadiah. Kami juga bekerjasama dengan perpustakaan daerah untuk menambah koleksi buku. Pada tahun 2007 kami mendapat bantuan dari perpustakaan daerah sebanyak 760 eksemplar buku. Dari sumbangan buku yang demikian saya sangat bersyukur karena dengan bertambahnya koleksi akan ada lebih banyak pilihan buku untuk masyarakat¹².

Sedangkan informan II selaku sekretaris perpustakaan dalam wawancara tanggal 3 Juli 2021, menyatakan bahwa :

Pengadaan koleksi masih berjalan kurang baik karena koleksi hanya kita dapatkan dari sumbangan, hadiah dan bantuan saja¹³.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan bapak Winarto yang berpendapat bahwa :

Pengadaan koleksi perpustakaan diperoleh dari sumbangan dan hibah. Sumbangan tersebut berasal dari perpustakaan daerah, dan perorangan¹⁴.

Hal senada juga disampaikan oleh pengguna perpustakaan mengenai koleksi perpustakaan yang belum mengakomodir kebutuhan masyarakat. berikut pernyataannya:

¹²Hasil Wawancara dengan Ibu Konitin Kepala Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 2 Juli 2021

¹³Hasil Wawancara dengan Ibu Nunik Sekretaris Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 3 Juli 2021

¹⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Winarto Kepala Desa Kepuh, pada tanggal 4 Juli 2021

Koleksi perpustakaan desa belum mengakomodir kebutuhan masyarakat. Jumlah koleksi masih minim sehingga seringkali masyarakat merasa bosan dengan koleksi buku yang itu-itu saja¹⁵.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada kepala perpustakaan adalah apakah menurut ibu kualifikasi perpustakaan sudah sesuai kebutuhan? Adapun pernyataan dari kepala perpustakaan yaitu:

Pada tahun 2008 saya mendapat mandat dari kepala desa untuk mengikuti diklat ilmu perpustakaan di Batu Malang. Saya tidak punya background ilmu perpustakaan sebenarnya mbak, tapi karena saya dipercaya ya saya berangkat saja. Nah dari situlah kemudian sedikit banyak saya mendapatkan ilmu bagaimana cara mengelola perpustakaan. jika dilihat secara akademis memang kurang sesuai. Tapi saya berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada kepala perpustakaan adalah apa kendala dalam pengelolaan perpustakaan desa? Adapun pernyataan dari kepala perpustakaan yaitu:

Kalau berbicara mengenai kendala tentu banyak sekali kendala yang dihadapi dalam rangka pengelolaan perpustakaan. mulai dari anggaran yang tidak ada dari pemerintah desa, sarana dan prasana yang sangat terbatas, perpustakaan yang tidak dikenal luas oleh masyarakat ditambah lagi minat baca masyarakat kita yang cenderung rendah¹⁶.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh sekretaris Perpustakaan yang berpendapat bahwa :

Banyak perpustakaan desa yang belum menjalankan pengelolaan perpustakaan secara optimal. Data dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat belum menaruh perhatian dan kepedulian terhadap perpustakaan desa. Kondisi perpustakaan yang serba terbatas, pengelolaan perpustakaan yang belum terlaksana secara optimal.

¹⁵Hasil Wawancara dengan Asharul Pengguna Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 15 Juli 2021

¹⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Konitin Kepala Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 2 Juli 2021

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada kepala perpustakaan adalah bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan perpustakaan desa? Adapun pernyataan dari kepala perpustakaan yaitu:

Dalam mengelola perpustakaan banyak factor pendukung keberhasilan dalam mengelola perpustakaan salah satunya peran pemerintah desa yang bisa dibilang paling dominan. Tanpa dukungan dari pemerintah desa maka operasional tidak akan berjalan dengan baik. Sejauh ini kami belum mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah desa, mungkin karena keberadaan perpustakaan belum menjadi prioritas dari pemerintah desa Kepuh¹⁷.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada kepala perpustakaan adalah apa harapan ibu kedepannya untuk perpustakaan desa dalam pengelolaan perpustakaan desa? Adapun pernyataan dari kepala perpustakaan yaitu:

Perpustakaan desa sangat penting kehadirannya di desa sebagai wujud pusat informasi masyarakat desa. Kehadiran perpustakaan desa merupakan langkah memperdayakan masyarakat agar memiliki kesadaran informasi yang baik. Maka perpustakaan desa harus memainkan peran. Harus mulai berbenah diri mulai dari mempersiapkan tenaga perpustakaan yang profesinal dibidangnya, sarana prasarana yang nyaman untuk pemustaka, menyediakan koleksi yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga masyarakat tertarik untuk membaca buku di perpustakaan desa ini¹⁸.

Disusul dengan keterangan pengguna perpustakaan Desa Kepuh yang menyatakan bahwa :

Perpustakaan Desa ini kan pusat informasi masyarakat yang paling dekat jika dibandingkan dengan keberadaan perpustakaan yang lain. Saya berharap perpustakaan ini terus berbenah. Banyak yang perlu dibenahi sih mbak. Dari koleksi, sarana prasarana dan juga pelayanannya¹⁹.

¹⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Konitin Kepala Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 2 Juli 2021

¹⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Konitin Kepala Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 2 Juli 2021

¹⁹Hasil Wawancara dengan Gevy Wulandari Pengguna Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 10 Juli 2021

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan perpustakaan desa belum terlaksana secara maksimal. Indikatornya seperti kualifikasi pustawawan yang bukan dari professional, pelayanan hanya dibuka pukul 08.00-12.00,

2. Penerapan Pengelolaan Perpustakaan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Dalam pengelolaan Perpustakaan desa diperlukan perencanaan dan program kerja, untuk mengetahui perencanaan dan program kerja di perpustakaan desa peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan kepada kepala perpustakaan, pengguna perpustakaan, sekretaris perpustakaan, anggota perpustakaan, dan kepala desa Kepuh. Pertanyaan pertama peneliti ajukan kepada kepala perpustakaan pertanyaannya adalah bagaimana pelayanan yang ibu lakukan dalam pengelolaan perpustakaan desa? kepala perpustakaan menyatakan bahwa :

Perencanaan dalam pelayanan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang telah tertera di dalam tata tertib perpustakaan. disana mencakup jam buka layanan dll dan tentu juga sikap pustakawan harus dilakukan sesuai prinsip 3S Senyum,salam, dan sapa²⁰.

Bu Nunik menambahkan bahwa :

Perencanaan dalam pengadaan buku bekerjasama dengan pemerintah kabupaten atau daerah untuk mendapatkan buku dan juga sumbangan dari masyarakat²¹.

Pak Deny Kristanto selaku anggota perpustakaan juga menjelaskan bahwa :

Dalam pengelolaan perpustakaan dilakukan oleh 3 orang. 1 orang menjadi kepala perpustakaan sekaligus bertugas untuk mengkoordinir jalannya organisasi²².

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Konitin Kepala Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 2 Juli 2021

²¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Nunik Sekretaris Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 3 Juli 2021

²² Hasil Wawancara dengan bapak Deny Kristanto Anggota Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 3 Juli 2021

Program kerja merupakan langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini program kerja merupakan serangkaian kegiatan yang telah disepakati bersama yang menjadi tolok ukur dalam pencapaian target saat melakukan pekerjaan. Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada kepala perpustakaan adalah apa saja program kerja yang sudah ibu jalankan untuk memajukan perpustakaan desa Kepuh? Adapun pernyataan dari kepala perpustakaan yaitu:

Perpustakaan ini kan terletak di balai desa yang sekaligus dijadikan paud desa, sehingga setiap hari pasti ada anak paud yang datang ke balai desa. Ini saya manfaatkan untuk mengajak para ibu dan anak-anak untuk mencintai buku. Anak-anak paud saya ajak ke perpustakaan untuk membaca nanti ibu-ibu yang menunggu anaknya juga saya anjurkan untuk meminjam buku sembari menunggu anaknya²³.

Adapun pernyataan dari anggota perpustakaan yaitu:

Program kerja yang kami lakukan hampir-hampir selalu sama dengan tahun-tahun sebelumnya mbak. Jadi tidak ada pembaharuan dalam perencanaan program kerja²⁴.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada kepala perpustakaan adalah bagaimana pelaksanaan perpustakaan dalam mengelola perpustakaan desa? Adapun keterangan dari Bu Konitian adalah

Dalam hal Pengadaan buku sejauh ini didapatkan dari sumbangan dan hibah dari daerah ataupun sumbangan masyarakat²⁵.

Keterangan lain dari sekretaris perpustakaan yang mengatakan bahwa:

Buku-buku yang ada di perpustakaan cerdas menggunakan system klasifikasi DDC (Decimal Dewey Classification)²⁶.

²³Hasil Wawancara dengan Ibu Konitin Kepala Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 2 Juli 2021

²⁴Hasil Wawancara dengan bapak Deny Kristanto Anggota Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 3 Juli 2021

²⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Konitin Kepala Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 2 Juli 2021

²⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Nunik Sekretaris Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 3 Juli 2021

Bapak Deny Kristanto juga menjelaskan terkait system katalogisasi perpustakaan, berikut penuturannya:

Dalam pembuatan katalog hal pertama adalah membuat kartu katalog subyek, membuat kartu katalog judul, dan membuat kartu katalog pengarang²⁷.

Bu Konitin menambahkan bahwa:

Dalam menyusun buku di perpustakaan cerdas disusun sesuai dengan referensi judul buku contohnya bahasa, filsafat, dan lainnya. Buku-buku ini bisa dipinjam ataupun dibaca ditempat. Bagi yang ingin meminjam buku nanti akan diberikan slip peminjaman sehingga kami akan tahu buku apa yang dipinjam dan jatuh tempo kapan buku akan dikembalikan²⁸.

Bu Nunik juga menjelaskan bahwa :

Pelayanan perpustakaan dibuka seminggu 2 kali setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 08.00-12.00. pengunjung yang datang harus mengisi buku tamu terlebih dahulu. bagi yang ingin meminjam buku maksimal boleh meminjam 2 buku selama 7 hari dan apabila terlambat mengemblikan akan dikenakan sanksi denda Rp.100,- per buku selama sehari untuk pengembangan perpustakaan²⁹.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada kepala perpustakaan adalah bagaimana pelaporan yang dilakukan di perpustakaan desa? Berikut penjelasan dari kepala perpustakaan:

Pelaporan belum ada mbak. Saya hanya mencatat secara manual dan belum ada pelaporan yang saya serahkan kepada pemerintah desa³⁰.

Pengawasan (*controlling*) merupakan proses pengawasan yang dilakukan oleh organisasi guna memastikan rencana kerja sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Wawancara dengan informan I selaku kepala perpustakaan, menyatakan bahwa :

²⁷Hasil Wawancara dengan bapak Deny Kristanto Anggota Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 3 Juli 2021

²⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Konitin Kepala Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 2 Juli 2021

²⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Nunik Sekretaris Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 3 Juli 2021

³⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Konitin Kepala Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 2 Juli 2021

Sejauh ini pengawasan yang dilakukan hanya sebatas monitoring biasa, yang saya lakukan untuk memastikan pengaturan buku dan penempatan buku sudah sesuai ataukah belum³¹.

Informan lain mengungkapkan bahwa :

Kepala perpustakaan melakukan pengecekan secara langsung dalam pengelolaan perpustakaan. beliau meninjau secara langsung ke lapangan³².

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada kepala perpustakaan adalah bagaimana anggaran untuk mengelola perpustakaan desa? Adapun jawaban dari kepala perpustakaan bahwa:

Anggaran dari pemerintah desa tidak ada sama sekali. Kalau kita merujuk pada Undang-undang seharusnya pemerintah desa mengalokasikan anggarannya untuk keberlangsungan perpustakaan desa. Tapi sampai sejauh ini memang tidak ada sama sekali dana dari pemerintah desa³³.

Informan II selaku sekretaris perpustakaan juga menegaskan bahwa

:

Tidak ada dana desa yang diberikan kepada perpustakaan desa untuk pengelolaan perpustakaan. Ini bisa dilihat dari sarana, prasarana yang ada di perpustakaan yang sangat minim. Dari tidak tersedianya tempat duduk di dalam perpustakaan, jumlah koleksi yang sedikit dan masih banyak lagi kendala yang lain karena memang kita tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan perpustakaan desa³⁴.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota perpustakaan:

Selama ini pendanaan perpustakaan hanya dari iuran anggota dan denda dari peminjam yang terlambat mengembalikan buku. Selebihnya tidak ada³⁵.

³¹Hasil Wawancara dengan Ibu Konitin Kepala Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 2 Juli 2021

³²Hasil Wawancara dengan Ibu Nunik Sekretaris Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 3 Juli 2021

³³Hasil Wawancara dengan Ibu Konitin Kepala Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 2 Juli 2021

³⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Nunik Sekretaris Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 3 Juli 2021

³⁵Hasil Wawancara dengan bapak Deny Kristanto Anggota Perpustakaan Desa Kepuh, pada tanggal 3 Juli 2021

3. Penerapan Pengelolaan Perpustakaan Desa Ditinjau dari Fiqh Siyasah

Pada penyusunan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai, Penerapan Pengelolaan Perpustakaan Desa Ditinjau dari Fiqh Siyasah, peneliti mewawancarai Bapak Samsudin selaku tokoh agama di Desa Kepuh. Adapun hasil wawancara tersebut adalah

Fiqh Siyasah merupakan hal-hal yang berkaitan dengan urusan umat demi tujuan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan³⁶.

Beliau juga menjelaskan bahwa

Dalam mengemban tugas manusia mempunyai tuntunan dan pegangan untuk mengolah alam raya ini agar tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu peraturan yang baik juga harus sesuai dengan aturan-aturan agama³⁷.

Beliau juga menjelaskan terkait pentingnya tanggungjawab dalam islam,

sebagai wujud kesempurnaannya, setidaknya manusia memiliki dua tugas dan tanggung jawab besar. Pertama, sebagai seorang hamba yang berkewajiban untuk memperbanyak ibadah kepadaNya sebagai bentuk tanggung jawab *'ubudiyyah* terhadap Tuhan. Kedua, sebagai khalifah yang memiliki jabatan *ilahiyyah* sebagai pengganti Allah dalam mengurus seluruh alam³⁸.

Dapat diketahui bahwa peraturan dibuat demi terwujudnya kemaslahatan selain itu peraturan dibuat agar bersesuaian dengan aturan-aturan agama. Dalam hal ini Kepala perpustakaan memiliki tanggungjawab untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah dan semua komponen perpustakaan.

C. Temuan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan peneliti di perpustakaan desa Kepuh peneliti mendapati bahwa dalam pengelolaan perpustakaan desa belum berjalan secara maksimal. Pengelolaan perpustakaan diatur di dalam

³⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Samsudin pada tanggal 20 Juli 2021

³⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Samsudin pada tanggal 20 Juli 2021

³⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Samsudin pada tanggal 20 Juli 2021

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. berdasarkan penelitian, berikut hasil yang diperoleh oleh peneliti :

1. Awal mula berdirinya perpustakaan desa merupakan inisiatif dari kepala desa yang memanfaatkan lahan kosong di balai desa.
2. Perpustakaan sudah memiliki visi dan misi dalam menjalankan organisasi
3. Jumlah koleksi perpustakaan diperoleh dari sumbangan masyarakat dan bantuan dari pemerintah daerah.
4. Pelayanan yang dilakukan sangat terbatas karena dilaksanakan seminggu 2 kali setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 08.00-12.00.
5. Tenaga perpustakaan bukan merupakan tenaga professional melainkan guru paud dan masyarakat yang bersedia untuk menjadi anggota perpustakaan.
6. Belum adanya dukungan dari pemerintah desa dalam hal penganggaran atau alokasi dana untuk pengembangan perpustakaan desa.
7. Pengelolaan perpustakaan desa yang dilakukan oleh perpustakaan cerdas desa Kepuh belum sesuai dengan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan perpustakaan desa. Ini terbukti masih ada banyaknya kekurangan dalam pengelolaan perpustakaan.
8. Dapat diketahui bahwa peraturan dibuat demi terwujudnya kemaslahatan selain itu peraturan dibuat agar bersesuaian dengan aturan-aturan agama. Dalam hal ini Kepala perpustakaan sebagai pemimpin dalam organisasi memiliki tanggungjawab untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah dan semua komponen perpustakaan demi terwujudnya kemaslahatan bersama sesuai dengan peraturan yang ada.

D. Pembahasan

1. Penerapan Pengelolaan Perpustakaan Desa di Desa Kepuh

Kurang maksimalnya pengelolaan perpustakaan desa dikarenakan kurangnya koleksi buku, tempat perpustakaan yang sempit, tenaga perpustakaan yang tidak sesuai dengan kompetensi, dan kurangnya dukungan dari pemerintah desa. Sesuai dengan pernyataan Kepala perpustakaan bahwa terbatasnya koleksi dan tidak adanya dukungan dari pemerintah desa sangat berpengaruh terhadap pengembangan perpustakaan.

Sesuai dengan teori yang dikutip dari *Mewujudkan Desa Pintar melalui Perpustakaan Desa*, <http://www.batukar.info/komunitas/articles/mewujudkan-desapintar-melalui-perpustakaan-desa> Minimal ada tiga faktor penting dalam pengelolaan perpustakaan desa agar keberadaannya dapat diterima di masyarakat³⁹.

1) Factor Tempat

Tempat menjadi factor penting yang berkaitan dengan akses mudah dan tidaknya sebuah tempat dijangkau oleh masyarakat. Dalam hal ini perpustakaan harus jemput bola seperti halnya penempatan lokasi atau tempat perpustakaan, sebaiknya berada pada tempat yang strategis agar masyarakat mudah untuk menjangkaunya. Pemilihan lokasi di rumah perangkat desa, atau membangun perpustakaan di wilayah pusat desa agar kehadirannya diketahui oleh khalayak.

2) Factor Koleksi dan Pengelola

Sesuai dengan fungsinya sebagai tempat untuk mengoleksi bahan pustaka perpustakaan harus memiliki pustaka yang

³⁹*Mewujudkan Desa Pintar melalui Perpustakaan Desa*, <http://www.batukar.info/komunitas/articles/mewujudkan-desapintar-melalui-perpustakaan-desa> diakses pada tanggal 22 Juni 2021 pada pukul 04.07

lengkap. Sebab dengan kelengkapan koleksi perpustakaan turut mendorong terjaminnya kebutuhan para pemustaka.

3) Faktor Kegiatan Perpustakaan

Perpustakaan desa perlu menyediakan bacaan yang bersifat keaksaraan fungsional yang menyediakan buku sesuai dengan mata pencaharian masyarakat. Oleh sebab itu perpustakaan perlu dilengkapi dengan bacaan mengenai aktivitas kehidupan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Dari pemaparan teori diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan perpustakaan desa belum berjalan secara maksimal. Kurang maksimalnya pengelolaan perpustakaan desa dikarenakan kurangnya koleksi buku, tempat perpustakaan yang sempit, tenaga perpustakaan yang tidak sesuai dengan kompetensi, dan kurangnya dukungan dari pemerintah desa. Sesuai dengan pernyataan Kepala perpustakaan bahwa terbatasnya koleksi dan tidak adanya dukungan dari pemerintah desa sangat berpengaruh terhadap pengembangan perpustakaan.

2. Penerapan Pengelolaan Perpustakaan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan perpustakaan telah membuktikan keseriusan pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk pengelolaan perpustakaan desa terdapat standar yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional SNP tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan. Standar ini menjadi acuan pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan di Indonesia. Dalam SNP tentang perpustakaan desa dijelaskan lima aspek yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan, yaitu:⁴⁰

⁴⁰Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standart Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2019), hal. 10-11

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan program kerja adalah sebuah tindakan perencanaan pelaksanaan program yang dilakukan secara sistematis, dengan capaian tujuan tertentu pada satu perodesasi kepemimpinan. Dengan demikian program kerja yakni, program yang direncanakan untuk dilakukan secara sistematis dan terukur, dengan capaian tujuan tertentu pada satu perodesasi kepemimpinan dalam organisasi. Perencanaan program kerja dibuat pada kurun waktu satu kepemimpinan, karena harus menjawab capaian yang diharapkan saat sang pemimpin melaksanakan tugas memimpin organisasi.

Perencanaan yan dilakukan oleh kepala perpustakaan desa Kepuh seringkali dilakukan dengan cara plagiasi/ copy paste kegiatan. Untuk mempermudah dalam pembuatan program, organisasi melakukan plagiasi program sebelumnya untuk dilaksanakan pada periode berikutnya. Hal ini tidak sepenuhnya salah, akan tetapi jika mengesampingkan kegiatan analisa terhadap sumber-sumber daya organisasi, maka plagiasi dan replikasi program akan membuat organisasi tidak berkembang dan bergerak ditempat. Dalam hal ini akan mematikan kreativitas organisasi dan tidak memfokuskan pada pengembangan organisasi. Perencanaan program haruslah memperhatikan capaian dan kondisi organisasi, sehingga ada keberlanjutan program dalam menjawab capaian visi organisasi. Sesuai teori yang diungkapkan oleh Susanto yang mengatakan bahwa pemimpin harus berusaha secara optimal memperhatikan serta memenuhi kepentingan organisasi, menyeimbangkan antara tujuan jangka panjang dan jangka

pendek, serta menjamin implementasi tata kelola organisasi yang baik⁴¹.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemimpin dalam organisasi atau perpustakaan harus memiliki program kerja tertulis baik mengenai perencanaan jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang agar visi, misi dan tujuan organisasi dapat tercapai.

b. Pelaksanaan

System layanan yang digunakan di perpustakaan cerdas desa Kepuh adalah system pelayanan terbuka. Dengan menggunakan system ini maka pemustaka bisa memilih buku yang diinginkan secara bebas dan langsung tanpa bantuan dari pustakawan. Jam buka layanan dibuka 2 kali dalam satu Minggu dengan rentan waktu pukul 08.00-12.00.

Dalam pelaksanaan yang dilakukan pustakawan dalam penyusunan buku di rak pustakawan menyusun berdasarkan referensi judul buku contohnya bahasa, filsafat, dan lainnya. Rak buku disusun berdasarkan urutan abjad bidang keilmuan. Hal pertama yang dilakukan dalam pengelolaan bahan pustaka adalah Pendaftaran dan pencatatan buku yang masuk kemudian memberikan nomor induk dan nomor klasifikasi buku, memberi cap perpustakaan, memberikan katalog dan kartu buku, penempatan buku di rak, penyusunan buku menurut klasifikasi buku dan yang terakhir pembuatan peraturan peminjaman dan tata tertib perpustakaan. jenis layanan yang dilakukan diantaranya mencangkup layanan sirkulasi dan manajemen layanan perpustakaan meskipun yang ditemui peneliti belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal.

c. Pengawasan

⁴¹Veithzal Rivai, *Education Management*, (Jakarta: Rajawali Pers,2010), hal. 223

Pelaksanaan tugas, kekuasaan, dan tanggung jawab dalam perpustakaan perlu adanya pengawasan, yang pada umumnya merupakan coercion atau compeling artinya proses yang bersifat memaksa agar kegiatan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan rencana. Pengawasan dikaitkan dengan upaya untuk mengendalikan dan membina sebagai upaya pengendalian mutu. Melalui pengawasan yang efektif, roda organisasi, implementasi rencana, kebijakan dan upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan lebih baik⁴². Pengawasan dan evaluasi di perpustakaan cerdas belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh

d. Pelaporan

Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan hendaknya dibuatkan catatan tertulis berupa laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan mulai dari latar belakang pelaksanaan kegiatan, tujuan, waktu pelaksanaan, siapa saja yang terlibat (pelaksana) dalam kegiatan, jumlah anggaran yang dipakai, dsb. Untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban tertulis dalam sebuah kegiatan⁴³. Hal ini seperti yang telah dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

⁴²Abdul Rasyid M, *Pengelolaan Perpustakaan Dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa Di MAN 1 Medan*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019), hal. 42 diakses tanggal 23 Juni 2021 pada pukul 06.53

⁴³Andi Ibrahim, *Manajemen dan Administrasi Perpustakaan*, (Makasar: Syahadah, 2016), hal. 188

وَأَمْرَ أَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
 كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا
 وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ
 بِكُمْ وَانْفُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat tersebut di atas dapat dilihat bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu mencatat atau membuat pembukuan jika melakukan sebuah

transaksi. Berkaitan dengan pembuatan laporan kegiatan ayat tersebut sejalan dengan perintah Allah SWT yang memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menuliskan hal-hal yang dapat diminatkan pertanggung jawabannya dikemudian hari.

Pelaporan yang dilakukan di perpustakaan cerdas adalah pencatatan secara manual oleh kepala perpustakaan dan belum ada pelaporan berkala yang disampaikan kepada pemerintah desa.

e. Penganggaran

Perpustakaan merupakan organisasi nirlaba, yang tidak berorientasi pada keuntungan dan memerlukan dana untuk membiaya segala aktivitas organisasinya. Karena itu anggaran sangat penting dalam pengelolaan sebuah perpustakaan. Pustakawan dan pengelola perpustakaan harus dapat merencanakan anggaran perpustakaan secara cermat. Karena itu penting bagi suatu perpustakaan untuk menyusun anggaran dengan baik setiap tahun lalu mengajukan kepada lembaga induknya. Hal ini seperti yang disebutkan Allah SWT dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an Surah Yusuf pada ayat 55 berikut ini :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

Terjemahnya: *Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan."*

Dalam ayat tersebut di atas bahwa dalam menyusun anggaran serta mengelola keuangan dibutuhkan keterampilan, pengetahuan dan kepandaian dalam mengelola masalah keuangan. selain itu orang yang menangani masalah anggaran haruslah orang yang dapat menjaga amanah yang diembannya.

Sesuai dengan pedoman penyelenggaraan perpustakaan desa penganggaran di perpustakaan cerdas belum berjalan secara teratur. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah desa untuk pengembangan perpustakaan.

3. Penerapan Pengelolaan Perpustakaan Desa Ditinjau dari Fiqh Siyasah

Penyusunan pengaturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat⁴⁴. Dalam *siyasah dusturiyah* mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada *nash* (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat)⁴⁵.

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Al Qur'an merupakan jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat. Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al-Qur'an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat.

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi

⁴⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nur Bani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 41

⁴⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hal. 189

para pemustaka. Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dari uraian tersebut dapat ditarik benang merah bahwa perpustakaan merupakan pusat informasi bagi masyarakat dengan koleksi yang dimilikinya yang keberadaanya berfungsi untuk memberdayakan masyarakat akan literasi informasi atau kesadaran informasi yang lebih baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan belum sesuai dengan UU Nomor 43 Tahun 2007 yang diperjelas pada peraturan kepala perpustakaan tentang standart pengelolaan perpustakaan desa. Dimana seharusnya pengelolaan mencakup beberapa hal yakni perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan dan penganggaran, dalam prakteknya kelima komponen tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Persoalan tersebut meliputi belum adanya pelaporan yang dilakukan kepala perpustakaan selaku penanggungjawab yang harus memberikan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa, pengawasan hanya dilakukan secara manual oleh kepala perpustakaan, dan tidak adanya anggaran dari pemerintah desa yang menjadi bukti bahwa belum maksimalnya pengelolaan perpustakaan mengalami banyak kendala dalam pelaksanaanya.

Pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan berkewajiban memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Kepala perpustakaan sebagai pemimpin dalam organisasi harus memiliki kebijakan yang diperuntukkan untuk menjamin kemaslahatan umat. Pada faktanya pelaksanaan pengelolaan tidak

sesuai dengan hukum islam. Sebagaimana tanggungjawab seorang pemimpin telah dijelaskan dalam surat Al Mudatsir ayat 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya:

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.